BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejak mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan masalah publik yang terkait dengan kebijakan publik makin disorot. Sementara itu, di sisi lain Indonesia perlu dorongan untuk melakukan penyempurnaan mekanisme politik melalui perundangan otonomi dan desentralisasi. Penyempurnaan mekanisme politik dilakukan dengan usaha keras melalui penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam bingkai masyarakat sipil yang efektif (*civil society*).

Daerah menjadi mandiri dan berkembang melalui paradigma *good governance.* Setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba memajukan daerahnya dengan beragam kegiatan. Pemerintah mengubah perannya dari penyedia dan pelaksana program ke peran fasilitator dan regulator. Mengadopsi istilah Osborne dan Gaebler (1992: 35) yang berpendapat *"Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing.* Pemerintah katalisator: yang menyetir bukan mendayung". Pemerintah tidak perlu melakukan segalanya sendiri atau sebagai pelaksana tetapi lebih kepada mengarahkan seperti membuat kebijakan, peraturan, dan undang-undang.

Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat

dikatakan meningkat apabila kondisi kesejahteraannya lebih baik dari pada sebelumnya. Kebijakan publik dapat dilakukan di bidang ekonomi. Pergeseran orientasi ekonomi berlangsung semakin cepat, sehingga memerlukan penyesuaian pola pikir agar mampu merespon perubahan secara terarah dan terkoordinasi. Perlu disadari kehadiran kreatifitas terjadi di semua lini kehidupan dengan segala produknya. Kebijakan publik di bidang ekonomi dapat dilakukan di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah yang dalam penulisan ini disingkat menjadi UMKM. Hal itu karena UMKM menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja, sangat fleksibel sehingga pelakunya dapat dengan cepat merubah barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan permintaan.

Perhatian pemerintah terhadap UMKM sangat besar, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Amerika Serikat, telah dibentuk sebuah lembaga dengan tugas khusus membantu lancarnya operasi usaha kecil, yaitu Lembaga Administrasi Usaha Kecil (*Small Business Administration*). Lembaga yang sama di bentuk pula di Inggris yang disebut Komisi Perusahaan-perusahaan Kecil (Wibowo, 2007:5). Seolah tak ingin ketinggalan, pemerintah Indonesia pun menyikapi gejala tersebut dengan mendirikan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang

mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

UMKM adalah sektor usaha yang mempunyai daya tahan tinggi sehingga mampu bertahan dari krisis dan moneter. Perkembangan UMKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UMKM dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar karena UMKM merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. UMKM juga menjadi ujung tombak bagi perusahaan besar dalam mendistribusikan produknya. UMKM juga bersifat lincah yang mampu hidup di sela-sela kehidupan usaha besar (Wibowo, 2007:6).

UMKM menggunakan strategi dengan membuat produk yang unik dan khusus sehingga tidak menghadapi usaha besar sebagai pesaing. UMKM memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan

perdagangan. UMKM perlu terus ditingkatkan agar dapat bertahan dan menjadi jantung perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia tumbuh cukup menggembirakan dan mampu menjadi dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2006-2010 mengalami peningkatan sebanyak 4.801.929 unit. Pada tahun 2011 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 55.206.444 unit sedangkan di tahun 2012 jumlahnya mencapai 56.534.592 unit, berarti selama setahun di tahun 2011-2012 jumlah UMKM di Indonesia meningkat sebanyak 1.328.148 unit (Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Tahun 2006-2012 Kementerian Koperasi dan UKM).

Pemerintah Indonesia memandang penting keberadaan UMKM karena disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif melalui proyek padat karya. Kedua, UMKM sangat dinamis sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi, UMKM mampu mencapai peningkatan produktivitas yang tinggi melalui investasi dan inovasi teknologi. Ketiga, UMKM memiliki fleksibilitas tinggi mampu berjalan dan berkembang meski Indonesia mengalami krisis ekonomi (Wibowo, 2007:6). Hal itu terbukti pada saat reformasi 1998, banyak perusahaan besar yang gulung tikar namun UMKM masih tetap berjalan meskipun kecil pengaruhnya. Alasan lain yang tidak

kalah penting adalah kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Perkembangan UMKM di Kota Probolinggo semakin bertambah, baik jumlah UMKM maupun omzet yang didapatkan. Adapun data jumlah UMKM Kota Probolinggo dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada **Tabel 1**. berikut ini.

Tabel 1.

Data Jumlah UMKM Kota Probolinggo

No.	Tahun	Jumlah UMKM
1	2009	695
2	2010	837
3	2011	1.079
4	2012	1.256
5	2013	1.406
	TOTAL	5.273

Sumber: Data yang diolah dari Diskoperindag

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kota Probolinggo di atas dari tahun 2009 sampai tahun 2013 jumlah UMKM meningkat sebesar 711 usaha. Hal ini dipengaruhi oleh upaya pemerintah Kota Probolinggo yang secara intensif mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya UMKM di Kota Probolinggo. Berbagai upaya pemerintah Kota Probolinggo dilakukan secara konsisten dengan memberikan bantuan-bantuan baik modal, peralatan, maupun fasilitas tempat usaha.

Kendala yang dihadapi oleh UMKM Kota Probolinggo merupakan masalah klasik yaitu terbatasnya dana dan pemasaran. Untuk masalah dana, pemerintah telah memberikan bantuan modal dan adanya pinjaman bank

bunga rendah. Untuk lebih meningkatkan hasil penjualan, hasil produksi UMKM yang ada di Kota Probolinggo tidak hanya mengincar pasar domestik saja karena pemerintah mengharapkan agar produksi UMKM Kota Probolinggo mampu dikenal secara luas, namun penjualan produk atau pemasaran adalah permasalahan UMKM yang ada di Kota Probolinggo. Demi mencakup pemasaran yang luas dan mengatasi permasalahan UMKM, maka Pemerintah Kota Probolinggo harus melakukan suatu program yang baru.

Terkait dengan program tersebut, maka di Kota Probolinggo membuat program yang membantu para pengusaha UMKM dalam hal pemasaran. Pemasaran yang luas akan menciptakan relasi atau jaringan yang luas pula sehingga produksi UMKM dan pemasarannya terus berkelanjutan. Program tersebut dikenal dengan sebutan *Morning On Panglima Sudirman Street* yang kemudian dalam penulisan ini akan disingkat menjadi MPS2. MPS2 diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pagi di Jalan Panglima Sudirman/*Morning Panglima Sudirman Street*. MPS2 merupakan suatu program berbasis ekonomi kerakyatan yang melibatkan UMKM yang ada di Probolinggo guna untuk membantu akses pemasaran bagi pengusaha UMKM di Kota Probolinggo untuk menawarkan produknya. Dalam program ini, juga melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Probolinggo, lembaga pendidik, asosiasi pedagang kaki lima dan sektor perbankan yang ada di Kota Probolinggo serta seluruh pelaku ekonomi daerah seperti pengusaha besar.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kota Probolinggo cenderung berorientasi pada usaha rakyat. Tujuannya untuk melatih masyarakat Kota Probolinggo agar lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, juga mendorong untuk tumbuhnya partisipasi masyarakat. Melalui pengembangan UMKM di Kota Probolinggo maka tujuan itu akan terwujud dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru karena UMKM merupakan usaha yang menggunakan metode padat karya. UMKM di Probolinggo yang beragam membuat Pemerintah Kota memiliki sebuah ide untuk menggabungkan semua UMKM dalam menjualkan produknya. Bermula dari ide tersebut maka program MPS2 pun dijalankan, MPS2 juga merupakan sarana wisata di Kota Probolinggo. Sebagai sarana wisata yang terbilang cukup baru maka daya tarik wisatawan pun juga meningkat. Tidak hanya dari wisatawan domestik tetapi juga dari luar kota maupun luar negeri. Dengan berkumpulnya wisatawan ini maka akan membantu pengusaha UMKM dalam mempromosikan produk unggulannya dengan begitu produknya lebih dikenal lagi di masyarakat luas.

Ide awal digelarnya MPS2 memang bertujuan untuk mengembangkan kreasi dan inovasi masyarakat Kota Probolinggo dan membantu para pengusaha UMKM untuk dapat meningkatkan pemasaran produknya. Selain itu, MPS2 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah khususnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pelaku atau pengusaha UMKM yang ada di Kota Probolinggo. Sementara itu program pelaksanaan MPS2 juga masih

perlu dikaji bagaimana program atau langkah selanjutnya. Pengkajian itu dilakukan untuk melatih kemandirian pelaku UMKM agar tidak terus bergantung kepada pemerintah. Namun, kendala dalam MPS2 selama ini yang sering dihadapi yaitu masalah tempat dan waktu.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas dan memperhatikan erat kaitannya dengan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM, peneliti tertarik untuk melakukan studi pada implementasi program kebijakan pemerintah kota dalam rangka mengetahui sumber kebijakan, komunikasi dan peran setiap *stakeholder* dalam mensukseskan program MPS2 dan kendala-kendala serta solusi yang dihadapi dilapangan selama program MPS2dijalankan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka judul yang dipilih untuk penelitian ini adalah **"Implementasi Program Morning On Panglima Sudirman Street (MPS2) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah"** (Studi pada Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan dan BAPPEDA Kota Probolinggo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *Morning On Panglima Sudirman Street* dalam mengembangkan UMKM di Kota Probolinggo?

2. Bagaimana perkembangan UMKM dengan adanya program *Morning On Panglima Sudirman Street*?
3. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menerapkan program *Morning On Panglima Sudirman Street* ?

C. Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *Morning On Panglima Sudirman Street* dalam mengembangkan UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan UMKM dengan adanya program *Morning On Panglima Sudirman Street.*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam menerapkan program *Morning On Panglima Sudirman Street.*

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang dimaksud dari adanya penelitian ini, terbagi menjadi dua yaitu kontribusi yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Kontribusi Teoritis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah dalam mengembangkan UMKM.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa yang akan datang.

c. Mengembangkan teori implementasi kebijakan, khususnya tentang konsep program MPS2 sebagai program pemerintah.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagi masukan dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan program MPS2 yang akan datang, agar program MPS2 terus berjalan dan lebih bervariatif program MPS2 kedepannya serta mampu mengatasi kendala yang ada.

b. Bagi Pengusaha UMKM

Sebagai bahan untuk terus meningkatkan hasil produksi dan pemasaran guna meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraannya.

c. Bagi Peneliti Sendiri

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan terutama dalam hal praktik-praktik implementasi kebijakan pemerintah khususnya dalam penerapan program MPS2 sebagai program yang memiliki tujuan untuk membantu pengusaha UMKM dalam menjualkan produknya serta meningkatkan meningkatkan kesejahterannya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan agar yang dibahas dalam penelitian ini dapat diketahui dan dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. Secara garis besar penulisan ini terbagi dalam lima bab yang kesemuanya merupakan satu kesatuan, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian termasuk di dalamnya alasan-alasan dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, kontribusi penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai landasan atau arahan yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga dapat membantu peneliti dalam menghubungkan antara konsep teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Mengemukakan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang mencakup materi yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data,teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan data-data dari hasil penelitian antara lain gambaran umum lokasi penelitian, data fokus penelitian kemudian data-data dari hasil

penelitian tersebut dianalisa dan diinterpretasikan. Bab ini sekaligus merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis kepada Pemerintah Kota Probolinggo, dalam mengatasi kendala yang ada selama penerapan MPS2 serta dapat meningkatkan program MPS2 kedepannya yang lebih bervariatif lagi kegiatannya sehingga pengusaha UMKM selain terbantu dalam hal pemasaran, pengusaha UMKM juga dapat meningkatkan produknya lebih banyak dan lebih luas sehingga dapat bersaing dengan daerah sekitar dan lebih meningkatkan pendapatannya sekaligus pendapatan daerah.